

BAB IV

KEPENTINGAN MYANMAR DALAM KEIKUTSERTAANYA PADA BALI DEMOCRACY FORUM

Rezim Junta Militer berkuasa di Myanmar hampir 50 tahun, terhitung sejak tahun 1962. Terjadi perkembangan kecil demokrasi yang muncul dengan diadakannya pemilu 1990 yang kemudian dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi namun akhirnya bibit-bibit demokrasi ini kembali layu manakala hasil Pemilu 1990 dibatalkan dan tak diakui oleh pemerintah.

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa dengan berkuasanya junta militer, memunculkan berbagai pelanggaran HAM yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian, baik di Myanmar sendiri maupun di dunia internasional. Junta militer membungkam rakyat Myanmar dengan menutup kesempatan bagi rakyat Myanmar untuk menyuarakan pendapat dan meminimalkan seminimal mungkin akses informasi dari dan ke dunia luar. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah serasa tidak memiliki batasan yang konkrit.

Keberhasilan militer mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi di Myanmar pada tahun 1988, meskipun pada tahap yang minimal, dijadikan legitimasi bagi militer untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Reformasi ekonomi yang

dijalankan oleh militer pada tahun 1989 telah membawa perubahan dan peningkatan yang signifikan terhadap devisa negara.⁵⁸

Junta militer sangat mengatur dan membatasi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya rakyat Myanmar. Pemerintah tak segan-segan mengambil tindakan yang kejam demi menumpas berbagai gerakan perlawanan yang pro-demokrasi. Seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu, Junta tak segan-segan membasmi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para biksu, yang menimbulkan jumlah korban yang sangat banyak, serta mendapat sorotan dunia internasional.

A. Alasan Keikutsertaan Myanmar dalam Bali Democracy Forum

A. 1. Adanya Tekanan Internal

Kemunculan gelombang protes yang terjadi di Myanmar, awalnya merupakan suatu perebutan kekuasaan dari berbagai etnis, terutama etnis mayoritas, yang berdiam di Myanmar. Etnis mayoritas di Myanmar, etnis Burma, merupakan kelompok pendatang yang berasal dari Tibet. Kelompok ini datang belakangan, dimana sebelumnya etnis Shan (Siam dalam bahasa Thai) telah terlebih dahulu mendiami Myanmar. Etnis Shan pada umumnya menghuni wilayah disepanjang perbatasan Thailand-Myanmar. Sebelum etnis Burma datang, selain etnis Shan, sudah ada etnis Mon, yang menghuni wilayah selatan, juga dekat perbatasan dengan Thailand.

⁵⁸ Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 2 No. 2, Januari 2003: 128-141

Untuk berkuasa, selayaknya ditempat lain, meletuslah perang yang terjadi antara tiga etnis utama di Myanmar ini. Inilah yang terjadi, perebutan kekuasaan, sebelum kedatangan Inggris pada tahun 1885. Ada juga etnis lain di Myanmar, yang kemudian turut meramaikan ketegangan politik sebelum penjajahan dan pasca-penjajahan Inggris.

Aung San dan U Nu adalah tokoh utama di balik kemerdekaan dan menjadi pemimpin negara. Namun tahun 1962, militer yang didominasi etnis Burma mengambil alih kekuasaan negara, dengan didalangi oleh Ne Win. Cikal bakal junta militer (disebut sebagai Dewan Negara untuk Perdamaian dan Pembangunan / SPDC) berasal dari kekuasaan Ne Win itu. SPDC sendiri didominasi oleh etnis Burma. Konfigurasi kekuasaan hak pun menjadi tidak berimbang antara etnis Burma yang mendominasi dan etnis non-Burma yang merasa ditindas. Sehingga muncullah perlawanan dari beberapa etnis non-Burma, termasuk etnis Karen, yang mendominasi wilayah pegunungan di utara, yang dikenal sebagai golden triangle (segitiga emas).

Berbagai cara ditempuh Etnis Burma untuk mencegah hal itu terjadi. Sejak 1960-an, terjadilah diaspora warga Myanmar. Berbagai warga Myanmar dari kelompok etnis kini tinggal di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar.

Pada pelaksanaan pemilu tahun 1990, Pihak demonstrasi pimpinan Aung San Suu Kyi meraih suara mayoritas sehingga kemenangan jatuh pada Pihak ini. Kemenangan ini tentulah ditentang oleh kelompok etnis Burma. Pihak Aung

San Suu Kyi dan etnis non-Burma lainnya merupakan ancaman bagi supremasi etnis Burma. Kemenangan Suu Kyi pun dilawan habis-habisan. Kekuasaan direbut. Hal inilah yang terjadi seterusnya.⁵⁹

Myanmar justru memiliki sejarah protes massa yang panjang walaupun pemerintahan Junta terkenal akan pelanggaran HAM. Gelombang protes Myanmar menguat sejak dimulainya masa pemerintahan militer Jenderal Ne Win. Tahun 1988, gelombang protes massa Myanmar ini melibatkan pelajar, pejabat sipil, pekerja hingga para biksu Budha. Ketika penggunaan tentara bersenjata demi kudeta militer dilakukan, protes dan kecaman datang dari berbagai kalangan.

Sejak awal masa Myanmar memang telah menginginkan berakhirnya junta militer ini. The State Peace and Development Council's (SPDC's) Myanmar mengajukan tuntutan yang populer untuk mereformasi pemerintahan menjadi neo-liberal. Tuntutan reformasi ini terutama berlaku untuk ekonomi, termasuk saat pemerintah Myanmar menarik subsidi BBM.

Gelombang protes kemudian terjadi lagi pada tahun 2007. Kali ini, daapt dikatakan bahwa protes ini diawali oleh para biksu budha di Myanmar. Awalnya adalah adanya aksi dari para biksu dalam menolak berbagai sumbangan makanan dari para jendral penguasa dan keluarganya. Hal ini menjadi suatu pertanda bahwa para biksu tidak lagi mau merestui kelakuan para penguasa militer Myanmar.

⁵⁹<http://www.geografiasean.110mb.com/MYANMAR.html>, yang diakses pada hari Jumat, 7

Demo yang melibatkan ribuan biksu ini menjalar ke berbagai kota di Myanmar, warga sipil pun pada akhirnya juga banyak yang mengikuti. Junta Militer memakai aksi kekerasan dalam membubarkan demo-demo besar ini, Pagoda-pagoda disegel, para demonstran ditahan, dan senjata digunakan untuk membubarkan massa. Banyak biksu ditahan, beberapa diyakini disiksa dan meninggal dunia.

Di Myanmar, setelah pemberontakan yang dipimpin biksu gagal pada tahun 2007 ini, warga ditengarai menggunakan internet untuk membocorkan informasi dan rekaman video real time ke dunia luas. Sejak itulah, rezim memblokir akses internet di Myanmar. Kini, akses internet telah dibuka kembali.⁶⁰

Pada masa sekarang ini, sebuah pemerintahan yang dibesarkan dengan berpondasikan sistem otokrasi dan otoriter dirasa sudah tidak pada tempatnya lagi. Semua pihak tentulah memiliki harapan kepada Myanmar, agar negara tersebut dapat segera menyelesaikan berbagai krisis, terutama krisis politik yang terjadi di wilayahnya, sehingga Myanmar dapat membawa rakyatnya untuk berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Myanmar membutuhkan sebuah kepemimpinan baru dan sistem baru yang bisa menjauhkan rakyat Myanmar dari krisis yang berkepanjangan, mampu mengakomodasi aspirasi seluruh rakyat, serta dapat membuka diri terhadap dunia luar. Sistem demokrasi sangat dibutuhkan oleh rakyat Myanmar karena rakyat di negara yang menganut sistem demokrasi

⁶⁰<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/29/l5a9dv-suu-kyi-myanmar-tak-butuh-revolusi-gaya-arab> yang diakses pada hari Jumat, 7 Oktober 2011

mendapat jaminan untuk menyuarakan pendapatnya, dilindungi hak asasinya dalam undang-undang, dan pemerintahan yang memiliki batasan kekuasaan.

A. 2. Adanya Tekanan External

A. 2.1. Tekanan dari Perserikatan bangsa-Bangsa

Negara yang bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 19 April 1948 ini, pernah mendapat peringatan keras dari Dewan Keamanan (DK) PBB pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena pemerintah junta melakukan penindasan dan penumpasan keji yang dilakukan terhadap aksi unjuk rasa damai. Dalam pernyataan tersebut, PBB juga menyerukan junta militer untuk melakukan pembebasan terhadap para tahanan politik serta seruan agar rezim itu bersedia untuk melakukan dialog dengan para tokoh pro-demokrasi yang ditahan, terutama Aung San Suu Kyi, demi terciptanya perdamaian nasional.⁶¹

Munculnya fakta yang membuktikan bahwa Myanmar menjalin hubungan sembunyi-sembunyi dengan Korea Utara dalam hal perdagangan senjata dan pelatihan militer sempat membuat heboh dunia internasional. Hal ini terungkap setelah kunjungan Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki Moon ke Myanmar pada 2009, meskipun tujuan utama Ban Ki Moon mengadakan kunjungan Myanmar adalah mengadakan negosiasi pembebasan tahanan politik dan menemui Suu Kyi.⁶²

61 <http://www.wartaterkini.com/78/90/42/myanmar-sesalkan-peringatan-keras-pbb.htm>, yang diakses pada Desember 2012

62 <http://www.suaramedia.com/berita-dunia/asia/8505-hubungan-gelap-myanmar-korea-utara-kejutkan-dunia.html>, yang diakses pada Desember 2011

A. 2. 2. Tekanan dari Negara-negara Uni Eropa

Dengan melihat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan junta, Uni Eropa segera memberlakukan berbagai sanksi keras terhadap Myanmar. Sanksi tersebut antara lain adalah:

1. Pembekuan asset milik pejabat junta militer
2. Pelarangan berkunjung ke Uni Eropa
3. Sanksi dalam hal perdagangan dan keuangan antara Uni Eropa dan Myanmar
4. Embargo senjata

Hubungan Uni Eropa dengan ASEAN sempat memanas saat Myanmar bergabung dalam ASEAN pada tahun 1997, saat itu junta militer masih berkuasa. Kemudian saat Myanmar akan menjadi ketua ASEAN pada 2006, Uni Eropa juga mengancam ASEAN bahwa ia akan meboikot pertemuan Uni Eropa dengan ASEAN.

⁶³Pada Oktober 2007, Setelah junta militer melakukan penumpasan aksi unjuk rasa damai yang dilakukan rakyat Myanmar dengan keji, Pemerintah Uni memberikan sanksi terhadap Myanmar, berupa embargo kayu, batu permata dan logam-logam. ⁶⁴

A. 2. 3. Tekanan dari Amerika Serikat

Pihak Amerika Serikat memberlakukan berbagai sanksi keras terhadap Myanmar, dilihat dari berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan junta militer. Sanksi sanksi tersebut antara lain adalah :

⁶³<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/307528-asean-sambut-baik-penanggulangan-sanksi-myanmar>, yang diakses pada Januari 2013

⁶⁴<http://www.wartaterkini.com/78/00/12/myanmar-sesalkan-peringatan-keras-pbb-htm>, yang

1. Larangan transaksi keuangan antara AS dan Myanmar
2. Larangan impor barang-barang Myanmar ke AS
3. Sanksi individu terhadap Presiden Thein Sein dan Ketua Parlemen Majelis Rendah Myanmar Shwe Mann, keduanya masuk daftar hitam pada 2007.
4. Pembekuan visa pejabat Myanmar
5. Pembekuan asset yang ada di lembaga keuangan AS
6. Embargo senjata

AS juga mendesak masyarakat internasional untuk memberikan tekanan ke pemerintahan junta militer Presiden AS saat itu, George W. Bush, mengungkapkan bahwa berbagai sanksi yang diberlakukannya terhadap Myanmar tidak akan berpengaruh sama sekali apabila AS merupakan satu-satunya pihak yang memberikan sanksi.⁶⁵ Pada bulan November 2007, AS mendesak ASEAN untuk mempertimbangkan lagi keanggotaan Myanmar dalam forum negara-negara Asia Tenggara tersebut. Desakan tersebut seperti yang diutarakan dalam resolusi Senat AS, yang diusulkan oleh Senator AS Barbara Boxer. Hal itu secara tidak langsung AS meminta 10 negara ASEAN lainnya untuk mencopot keanggotaan Myanmar dalam ASEAN. Seperti yang kita ketahui bahwa AS dan Uni Eropa merupakan mitra dagang utama ASEAN. Namun hal tersebut ditolak oleh ASEAN, seperti yang diutarakan oleh Sekretaris Jendral ASEAN, Ong Keng Yong, yang menyatakan bahwa Myanmar adalah bagian dari keluarga (ASEAN) yang harus didisiplinkan melalui dialog. Dalam sudut pandang negara-negara ASEAN, mengeluarkan

⁶⁵<http://www.antaraneews.com/berita/1192518137/as-desak-masyarakat-internasional-tingkatkan-tekanan-ke-myanmar-yang-diakses-pada-januari-2013>

Myanmar dari keanggotaan bukanlah solusi yang tepat untuk menghentikan berbagai tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militer.⁶⁶

B. Manfaat Bali Democracy Forum untuk Myanmar

1. Tujuan Bali Democracy Forum bagi Rezim Junta Militer

Junta Militer Myanmar dianggap telah gagal dalam pemerintahan di Myanmar. Hal ini dapat dilihat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah akibat kebijaksanaan yang diterapkannya. Berbagai hak rakyat Myanmar, dalam bidang sosial, budaya maupun politik dibungkam oleh Junta. Rakyat merasa sangat sulit untuk mendapatkan rasa aman dan tenang ketika Junta Militer memegang tampuk kekuasaan. Berbagai sanksi dan embargo yang diberlakukan oleh berbagai negara di belahan dunia dinilai tidak efektif untuk menyudahi pemerintahan kejam Junta.

Samuel Huntington dalam bukunya *The Third Wave* menjelaskan, *Democratization in the Late Twentieth Century* (1991) menjelaskan bahwa dari tahun 1974 hingga 1990-an merupakan gelombang demokrasi dunia. Kudeta di Portugal pada tahun 1974 memulai gelombang gelombang ketiga demokratisasi dunia, yang dalam lebih dari 15 tahun diikuti oleh kudeta-kudeta dan kebangkitan demokrasi di lebih dari 20 negara. Rekan sesama anggota ASEAN, seperti Thailand, Filipina, Vietnam dan Indonesia juga mengalaminya. Tumbangya berbagai rezim militer yang

⁶⁶ https://www.researchgate.net/publication/312007111/figure/fig/1/2007/11/10/18/61808/asset/asset_image_upload.png

berkuasa tersebut cukup membuat Junta khawatir akan tumbang kekuasaan yang dipegangnya. Selain itu, munculnya berbagai protes dan kekacauan dalam negeri juga membuat pemerintah Junta untuk membuat opsi lain. Pilihan tersebut adalah, memberikan peluang tumbuhnya demokrasi di negara tersebut.

Pemerintah Junta Militer memutuskan untuk mengadakan Pemilu di tahun 2010. Partai utama milik Junta Militer, Partai Pembangunan dan Kesatuan Solidaritas (USDP) memenangkan Pemilu yang diadakan setelah 20 tahun tersebut. USDP meraih 80 persen suara. Konstitusi Myanmar memberikan 25 persen kursi parlemen secara cuma-cuma kepada para perwakilan militer. Namun sayangnya dalam pemilu kali ini para tahanan politik belum dapat turut berpartisipasi, termasuk Aung San Suu Kyi yang baru dibebaskan setelah pemilu berlangsung.⁶⁷ Menjelang berlangsungnya pemilu, berbagai hukum dan peraturan menyangkut pemilu pun diterapkan oleh junta militer. Namun berbagai hukum dan peraturan dalam pemilu yang diberlangsungkan pada 7 November 2010 tersebut dianggap berat sebelah oleh komunitas internasional.⁶⁸

Pada 30 Maret 2011, Myanmar telah melantik seorang Presiden. Dimana ini berarti pembubaran Dewan Perdamaian dan pembangunan Negara (*The State Peace*

⁶⁷ <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=65891>, yang diakses pada Januari 2011

⁶⁸ <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/170864-junta-myanmar—pemilu-tanggal-7-november>, yang diakses pada Januari 2011

and Development Council / SPDC) yang dipimpin oleh Jendral Than Shwe, seperti yang dikutip dalam sebuah keputusan yang dibuat Than Shwe.⁶⁹

Meskipun Pemilu kali ini masih banyak terdapat campur tangan pihak militer, namun hal ini merupakan angin segar bagi arus demokrasi di Myanmar. Pasca Pemilu, ratusan tahanan politik pun dibebaskan.

2. Progres Penerapan Sistem Demokrasi di Myanmar

Meskipun pemilu yang digelar pada akhir tahun 2010 masih penuh dengan pengaruh junta militer, namun pada kenyataannya Presiden Thein Shein dinilai membawa berbagai perubahan positif bagi Myanmar. Berikut ini akan dibahas beberapa pengaruh dan kemajuan yang dicapai Myanmar pasca Pemilu 2010.

B.2.1. Pembubaran The State Peace and Development Council

Pada 30 Maret 2011, Myanmar telah melantik seorang Presiden. Dimana ini berarti pembubaran Dewan Perdamaian dan pembangunan Negara (*The State Peace and Development Council/SPDC*) yang dipimpin Jendral Than Shwe, seperti yang dikutip dalam keputusan yang dibuat Than Shwe.⁷⁰

⁶⁹<http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah-myanmar-terbentuk-junta-militer-dibubarkan/5095>, yang diakses pada hari Senin, 9 Mei 2011

⁷⁰<http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah-myanmar-terbentuk-junta-militer-dibubarkan/5095>, yang diakses pada hari Senin, 9 Mei 2011

B.2.2. Pembebasan Tahanan Politik

Tokoh Pejuang Demokrasi, Aung San Suu Kyi dibebaskan oleh pemerintah Myanmar pada November 2010, tepatnya satu minggu setelah pelaksanaan pemilu. Sampai dengan Januari 2001, pemerintah telah memberikan amnesty dan membebaskan sedikitnya 651 tahanan politik. Tahanan politik tersebut seperti misalnya:

- Min Ko Naing, merupakan tokoh oposisi terpenting kedua setelah Aung San Suu Kyi. Ia adalah tokoh Kelompok Generasi Mahasiswa tahun 1988. Ia dihukum karena dianggap sebagai dalang dari ribuan mahasiswa yang melawan junta militer.
- Khin Nyut, yang merupakan bekas kepala intelijen dan kepala pemerintahan. Ia dipaksa mundur pada tahun 2004 dalam perebutan kekuasaan internal junta militer, yang kemudian ditangkap atas tuduhan korupsi.⁷¹

B.2.3. Pengurangan dan pencabutan sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh

Negara-negara barat kepada Myanmar

Negara-Negara Uni Eropa

Uni Eropa memutuskan untuk menanggihkan sebagian besar sanksi yang ia berikan pada Myanmar. Keputusan ini telah disetujui dan disahkan

dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg pada 23 April 2012. Sementara embargo militer masih tetap akan diberlakukan.⁷² Sanksi-sanksi yang ditangguhkan tersebut termasuk pembekuan asset milik pejabat junta militer dan pelarangan berkunjung, ditangguhkan selama 1 tahun. Penangguhan ini diaktifkan setelah Uni Eropa menganggap reformasi dan demokrasi di Myanmar adalah proses yang terus berjalan dan positif. Evaluasi terhadap pemerintahan Myanmar akan terus diperhatikan dan di evaluasi oleh Uni Eropa.⁷³

Amerika Serikat

Amerika Serikat telah membekukan hubungan luar negerinya dengan Myanmar dalam waktu lebih dari 20 tahun. Kini kedua belah pihak telah sepakat untuk memperbaiki hubungan antar negara tersebut. Hal itu dimulai dengan bertukar duta besar.⁷⁴

⁷²<http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/88950>, yang diakses pada Januari 2013

⁷³<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/307528-asean-sambut-baik-penangguhan-sanksi-myanmar>, yang diakses pada Januari 2013

⁷⁴<http://www.dv.de/as-berencana-pulihkan-hubungan-diplomatik-dengan-myanmar/>